



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 52 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Dinas Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Dinas Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 52**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kerja DPMD Kabupaten Garut Tahun 2022 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Garut tahun 2022 dengan tema “ Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat”, untuk periode 1 tahun yang penyusunannya berpedoman pada

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renja Tahun 2022 adalah sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dalam pelaksanaan kegiatannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 15. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025;



24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Konkuren Kabupaten Garut;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 57 tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut;
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja adalah menetapkan program dan kegiatan agar senantiasa sesuai dengan kinerja yang ingin dicapai sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.



**BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU**

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Llalul dan Capaian Renstra DPMD, Analisis Kinerja Pelayanan DPMD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD, Review terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD

Memuat rencana kerja dan pendanaan anggaran DPMD.

BAB V. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN Melampirkan data dan informasi yang mendukung pemaparan Renja.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sampai dengan akhir tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Perlu juga diketahui bahwa tidak semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dalam tahun tersebut. Hal ini tidak terlepas dari adanya perubahan kebijakan yang terkait dengan aspek penganggaran. Capaian untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran dari Program ini adalah terpenuhinya fasilitas kebutuhan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran. Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.548.555.000,- dan terealisasi sebesar Rp.524.561.440,- yang diimplementasikan kedalam 12 (Dua Belas) kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 61.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 45.932.240,-. Sasaran kegiatan ini yaitu cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Output dari kegiatan ini adalah telepon, air, listrik dan internet . Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan



- aparatur.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.946.200,-. Sasaran kegiatan ini yaitu cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Output dari kegiatan ini adalah pajak kendaraan roda 2 dan roda 4. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan aparatur.
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 14.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.100.000,-. Sasaran kegiatan ini yaitu cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Output dari kegiatan ini adalah peralatan kebersihan dan bahan pembersih, upah kerja. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan aparatur.
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,-. Sasaran kegiatan ini yaitu cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Output dari kegiatan ini adalah service computer, service printer, service laptop. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan aparatur.
 - e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.000.000,-. Sasaran kegiatan ini yaitu cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Output dari kegiatan ini adalah jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan



- aparatur.
- f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp.47.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.500.000,-. Sasaran kegiatan ini yaitu cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Output dari kegiatan ini adalah jumlah cetakan blangko administrasi dinas dan fotocopy. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan aparatur.
 - g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,-. Sasaran kegiatan ini yaitu cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Output dari kegiatan ini adalah alat listrik dan elektronik. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan aparatur.
 - h. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.153.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp.152.953.000,-. Sasaran kegiatan ini yaitu cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Output dari kegiatan ini adalah air conditioner, laptop, printer, scanner, wireless dan kamera. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan aparatur.
 - i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.10.00.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Output dari kegiatan ini adalah surat



kabar/majalah dan iklan. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan aparatur.

- j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- terealisasi sebesar Rp.12.395.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Output dari kegiatan ini adalah makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan aparatur.
- k. Kegiatan Rapat-Rapat Konsultasi ke Luar Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.56.865.000,- terealisasi sebesar Rp. 56.695.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Output dari kegiatan ini adalah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan aparatur.
- l. Kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan Ke Dalam Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.89.040.000,- terealisasi sebesar Rp.89.040.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Output dari kegiatan ini adalah koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan aparatur.



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini adalah Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas. Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.393.164.782,- dan terealisasi sebesar Rp.390.145.000,- yang diimplementasikan kedalam 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp.90.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 88.504.500,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase sarana prasarana dalam kondisi baik. Output dari kegiatan ini adalah Kendaraan Roda 2 (Motor). Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah indeks kepuasan aparatur.
- b. Kegiatan Pengadaan Mebeulair, dengan anggaran sebesar Rp. 65.137.800,- terealisasi sebesar Rp. 64.135.800,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase sarana prasarana dalam kondisi baik. Output dari kegiatan ini adalah Meja kerja dan Lemari arsip 2 pintu besi. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah indeks kepuasan aparatur.
- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.87.225.482,- terealisasi sebesar Rp. 86.759.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase sarana prasarana dalam kondisi baik . Output dari kegiatan ini adalah Pemeliharaan atap, dinding, lantai dan halaman/taman. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah indeks kepuasan aparatur.



- d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase sarana prasarana dalam kondisi baik. Output dari kegiatan ini adalah jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah indeks kepuasan aparatur.
- e. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.117.249.000,- terealisasi sebesar Rp. 117.194.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase sarana prasarana yang baik. Output dari kegiatan ini adalah Rehab gedung kantor. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah indeks kepuasan aparatur.
- f. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pusat pelayanan public terpadu, dengan anggaran sebesar Rp.18.552.500,- terealisasi sebesar Rp. 18.552.500,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase sarana prasarana yang baik. Output dari kegiatan ini adalah jumlah sarana pelayanan publik. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah indeks kepuasan aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah meningkatnya pemenuhan kualitas sumber daya pegawai. Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 149.055.000,-



yang diimplementasikan kedalam 1 (Satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Peningkatan kualitas sumber daya pegawai, dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 149.055.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah Tingkat pemenuhan kualitas sumber daya pegawai. Output dari kegiatan ini adalah jumlah pegawai DPMD yang mengikuti capacity building. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah indeks kepuasan aparatur.

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Sasaran dari program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah terlaksananya penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan. Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi Rp. 25.000.000,- yang diimplementasikan kedalam 1 (Satu) kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000 realisasi Rp. 25.000.000,-. Sasaran kegiatan ini adalah Persentase pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan. Output dari kegiatan ini adalah Dokumen SAKIP tahun 2019. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Aparatur.



5. Program Peningkatan Perencanaan SKPD

Sasaran dari Program Peningkatan Perencanaan SKPD adalah tercapainya penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai yang direncanakan. Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.965.000,- yang diimplementasikan kedalam 1 (Satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.965.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Aparatur.

6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Sasaran dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan Usaha Ekonomi di Desa/Kelurahan. Program ini didukung anggaran sebesar Rp.526.305.000,- dan terealisasi sebesar Rp.522.791.800,- yang diimplementasikan ke dalam 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.90.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 90.036.800,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah



Persentase BUMDES yang sehat. Output dari kegiatan ini adalah Alat usaha ekonomi dan Jumlah Kelompok Usaha. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.

- b. Kegiatan penguatan manajemen dan kemampuan kelembagaan bumdes, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 282.430.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 280.197.730,-. Sasaran kegiatan ini adalah persentase bumdes yang sehat. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta bimtek pengelolaan manajemen BUMDes. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.
- c. Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.123.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 121.957.270,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah Persentase BUMDesa yang sehat. Output dari kegiatan ini adalah pipanisasi air bersih dan jumlah kawasan perdesaan yang dibentuk dan dikembangkan. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan social masyarakat.
- d. Kegiatan Sosialisasi pembentukan BUMDes bersama, kegiatan ini di dukung dengan pagu anggaran Rp. 5.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.100.000,-. Sasaran kegiatan ini adalah Persentase BUMDes yang sehat. Output dari kegiatan ini adalah peserta sosialisasi. Hasil yang ingin



dicapai adalah persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi lingkungan social masyarakat.

- e. Kegiatan Teknologi Informasi Pemberdayaan Ekonomi terpadu, kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.500.000,-. Sasaran kegiatan ini adalah Persentase BUMDes yang sehat. Output dari kegiatan ini adalah peserta sosialisasi. Hasil yang ingin dicapai adalah persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi lingkungan social masyarakat.

7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan partisipasi masyarakat

Sasaran dari Program Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat adalah meningkatnya partisipasi masyarakat pada lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa Program ini didukung anggaran sebesar Rp. 4.041.163.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.020.250.152,- yang diimplementasikan kedalam 13 (Tiga Belas) kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Bina Kerja PKK, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.950.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 949.079.840. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase lembaga desa /kelurahan yang aktif. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta rapat koordinasi, jumlah peserta bina wilayah, jumlah peserta pelatihan kader desa wisma, jumlah lomba menu etnik tingkat kabupaten, jumlah peserta pelatihan kepemimpinan dan jumlah yang diberi



- stimulan untuk penanganan covid. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.
- b. Kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis kepemimpinan kader bagi kader PKK desa. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 49.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.665.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase lembaga desa /kelurahan yang aktif. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Bimtek. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.
- c. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kel. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 397.000.000,-. Sasaran dari kegiatan ini persentase lembaga desa /kelurahan yang aktif. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah anggota lembaga desa yang dibina. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.
- d. Kegiatan Lomba Posyandu dan Olimpiade Kader, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 47.810.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.810.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase lembaga desa /kelurahan yang aktif. Output dari kegiatan ini adalah juara lomba posyandu dan juara olimpiade kader. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.



- e. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 23.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.000.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase lembaga desa /kelurahan yang aktif. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.
- f. Kegiatan penguatan kelembagaan posyandu melalui pokjantal kabupaten. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 18.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.400.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase lembaga desa /kelurahan yang aktif. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.
- g. Kegiatan Pembinaan pengelola Ex PNPM MPd tentang asset. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 15.140.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.890.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase lembaga desa /kelurahan yang aktif. Output dari kegiatan ini adalah Dokumen Perguliran aset ex PNPM MPd. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.
- h. Kegiatan pencaanangan bulan bhakti gotong royong masyarakat. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar



Rp. 192.727.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 192.727.000,-. Sasaran dari kegiatan ini persentase lembaga desa /kelurahan yang aktif. Output dari kegiatan ini adalah Dokumen Perguliran aset ex PNPM MPd. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.

- i. Kegiatan Bhakti Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 971.136.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 971.136.000,-. Sasaran dari kegiatan ini persentase lembaga desa /kelurahan yang aktif. Output dari kegiatan ini adalah jumlah sarana prasarana yang dibangun. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.
- j. Kegiatan peraningkatan peran masyarakat melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS). Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 223.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 219.584.500,-. Sasaran dari kegiatan ini persentase peningkatan kewaspadaan masyarakat. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah sarana prasarana yang dibangun. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.
- k. TNI Manunggal Membangun Desa (Kabupaten Garut) (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Garut Jl. Otista 176 Kel Cimanganten Kec. Tarogong Kaler) (Banprov). Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.



500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 495.101.820,-. Sasaran dari kegiatan ini persentase peningkatan kewaspadaan masyarakat. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah sarana prasarana yang dibangun. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat

1. Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (kab. Garut) (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Garut Jl. Otista 176 Kel Cimanganten Kec. Tarogong Kaler) (Banprov). Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 397.877.592,-. Sasaran dari kegiatan ini persentase peningkatan kewaspadaan masyarakat. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah sarana prasarana yang dibangun. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.
- m. Kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) (kab. Garut) (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Garut Jl. Otista 176 Kel Cimanganten Kec. Tarogong Kaler) (Banprov). Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 243.978.400,-. Sasaran dari kegiatan ini persentase peningkatan kewaspadaan masyarakat. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah sarana prasarana yang dibangun. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase rata-



rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.

8. Program Pengembangan Potensi Desa

Sasaran dari Program Pengembangan Potensi Desa adalah meningkatnya pengelolaan potensi desa. Program ini didukung anggaran sebesar Rp. 239.437.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 239.437.000,- yang diimplementasikan kedalam 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG), Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.585.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.585.000,-. Sasaran dari kegiatan ini persentase jumlah desa yang menerapkan inovasi dan TTG. Output dari kegiatan ini adalah Gelar TTg tingkat Provinsi dan alat TTG. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.
- b. Kegiatan Bimtek inovasi alat teknologi tepat guna bagi pengurus posyantek, kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 72.900.000,-. Sasaran dari kegiatan ini persentase jumlah desa yang menerapkan inovasi dan TTG. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah peserta Bimtek. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.
- c. Kegiatan Strata Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, kegiatan ini didukung dengan pagu



anggaran sebesar Rp. 6.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.800.000,-. Sasaran dari kegiatan ini persentase jumlah desa yang menerapkan inovasi dan TTG. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah pegawai honorer tidak tetap. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.

d. Kegiatan pendampingan bantuan provinsi peningkatan infrastruktur perdesaan, kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 117.852.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 117.852.000,-. Sasaran dari kegiatan ini persentase jumlah desa yang menerapkan inovasi dan TTG. Output dari kegiatan ini adalah jumlah desa yang dimonitoring dan jumlah peserta bimtek. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.

e. Kegiatan inventarisasi potensi sumber daya alam, kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.400.000,-. Sasaran dari kegiatan ini persentase jumlah desa yang menerapkan inovasi dan TTG. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah pegawai honorer tidak tetap. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.

f. Kegiatan pendampingan program bantuan kemendes peningkatan sarana prasarana desa, kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.900.000,- dan



teralisasi sebesar Rp. 17.900.000,-. Sasaran dari kegiatan ini persentase jumlah desa yang menerapkan inovasi dan TTG. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah jumlah desa yang dimonitoring. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.

9. Peningkatan Bina aparatur dan asset pemerintah desa

Sasaran dari Program Peningkatan bina aparatur dan asset pemerintah desa adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa. Program ini didukung anggaran sebesar Rp. 5.596.356.378,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.226.103.851,- yang diimplementasikan kedalam 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.4.733.566.378,- dan terealisasi sebesar Rp.4.365.590.611,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah aparatur desa yang dibayarkan BPJS. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase desa yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Kegiatan Evaluasi perkembangan desa, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.127.875.000,- dan terealisasi sebesar Rp.127.000.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase desa yang tertib administrasi



- pemerintahan. Output dari kegiatan ini adalah Dokumen perkembangan desa. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase desa yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Kegiatan Profil desa dan kelurahan, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.98.310.000,- dan terealisasi sebesar Rp.98.310.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan. Output dari kegiatan ini adalah Dokumen profil desa dan kelurahan. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase desa yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.75.000.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah desa yang dibina tentang penyelenggaraan pemerintah desa. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase desa yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Kegiatan Raperda tentang perubahan ke 2 atas peraturan daerah no 18 tahun 2014 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.145.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.144.352.660,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan.



Output dari kegiatan ini adalah jumlah peraturan daerah perubahan. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase desa yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- f. Kegiatan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah no 19 tahun 2014 tentang BPD, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.120.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.119.245.580,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peraturan daerah perubahan. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase desa yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- g. Kegiatan pelantikan kepala desa definitif, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.60.000.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan. Output dari kegiatan ini adalah pelantikan kepala desa definitif. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah persentase desa yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- h. Kegiatan sosialisasi Perbup ADD dan DD, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 236.605.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 236.605.000,-. Sasaran dari kegiatan ini adalah persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta sosialisasi. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini



adalah persentase desa yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Semua kegiatan memiliki nilai rata-rata capaian kinerja diatas 93 %, yang artinya capaian kinerja kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masuk kategori baik.

Seperti halnya kegiatan tahun 2020, pada tahun 2021 pun tidak semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan. Sesuai dengan DPA 2021 kemungkinan capaian kinerja tahun 2021 dicapai melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-.
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-.
 - iii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.127.781.355,-.



- ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,-.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan alokasi anggaran Rp. 148.887.909,-.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.643.400,-.
 - ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp88.556.791,-.
 - iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.146.500,-.
 - iv. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.192.000,-.
 - v. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.030.000,-.
 - vi. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 143.915.000,-.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :



- i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.929.282,-.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-.
 - ii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.600.000,-.
 - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.372.600,-.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.596.000,-.
 - ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.000.000,-.

Tujuan program ini adalah terpenuhinya fasilitas kebutuhan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran. Melalui program ini diharapkan pelayanan administrasi perkantoran dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang



telah ditetapkan. Total alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 6.224.650.837,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Rincian Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Berdasarkan Sumber Dana**

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Ket
1	APBN	-	
2	APBD Provinsi	-	
3	APBD Kabupaten	6.224.650.837	
Jumlah		6.224.650.837	

2. Program Penataan Desa, dengan kegiatan :

a. Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan sub kegiatan :

- i. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,-.
- ii. Fasilitasi Tata Wilayah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.290.000.000,-.
- iii. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.250.000.000,-.

Tujuan program ini adalah terselenggaranya penataan desa dengan baik. Melalui program ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Total alokasi



anggaran program ini sebesar Rp. 1.790.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Rincian Anggaran
Program Penataan Desa
Berdasarkan Sumber Dana**

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Ket
1	APBN	-	
2	APBD Provinsi	-	
3	APBD Kabupaten	1.790.000.000	
Jumlah		1.790.000.000	

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa, dengan kegiatan :

a. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, dengan sub kegiatan :

- i. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-.
- ii. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-.

Tujuan program ini adalah terlaksananya kerjasama antar desa. Melalui program ini diharapkan tercapainya peningkatan kerjasama antar desa. Total alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 250.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 2.3. Rincian Anggaran
Program Peningkatan Kerjasama Desa
Berdasarkan Sumber Dana**

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Ket
1	APBN	-	
2	APBD Provinsi	-	
3	APBD Kabupaten	250.000.000	
Jumlah		250.000.000	

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan :

- i. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175.000.000,-.
- ii. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-.
- iii. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 194.200.000,-.
- iv. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.
- v. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.731.866.378,-.



- vi. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-.
- vii. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-.
- viii. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-.
- ix. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 194.000.000,-.
- x. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,-.
- xi. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175.000.000,-.

Tujuan program ini adalah terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Melalui program ini diharapkan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Total alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 8.840.066.378,- dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 2.4. Rincian Anggaran
Program Administrasi Pemerintahan Desa
Berdasarkan Sumber Dana**

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Ket
1	APBN	-	
2	APBD Provinsi	-	
3	APBD Kabupaten	8.840.066.378	
Jumlah		8.840.066.378	

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kegiatan :

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya HUKUM Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-.
 - ii. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.075.000.000,-.



- iii. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-.
- iv. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 319.368.000,-.
- v. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-.
- vi. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-.

Tujuan program ini tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sesuai yang direncanakan. Melalui program ini diharapkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Total alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 3.444.368.000,- dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 2.5. Rincian Anggaran
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga
Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Berdasarkan Sumber Dana**

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Ket
1	APBN	-	
2	APBD Provinsi	-	
3	APBD Kabupaten	3.444.368.000	
Jumlah		3.444.368.000	

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMD tahun lalu dan realisasi Renstra DPMD disajikan pada tabel berikut ini :

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan
Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Tahun 2021
Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan desa dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD 2021)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021		
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa										
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan										
	1	Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di pedesaan	Alat usaha ekonomi, jumlah kelompok usaha	75 Kelompok		160 Orang (16 Kelompok)	160 Orang (16 Kelompok)	100	1 unit, 5 Kelompok Usaha	21 Kelompok	28
	2	Penguatan Manajemen dan Kemampuan Kelembagaan BUMDes	Jumlah peserta Bimtek pengelolaan manajemen BUMDesa	2947 Orang	-	650 Orang	650 Orang	100	70 Pengelola BUMDes	720 Orang	24
	3	Pengembangan Kawasan Pedesaan	Pipanisasi air bersih, jumlah kawasan pedesaan yang dibentuk dan dikembangkan	10 Kawasan Perdesaan	-	2 Kawasan Perdesaan	2 Kawasan Perdesaan	100	1 Unit 3 Kawasan Pedesaan	5 Kawasan Perdesaan	50
	4	Sosialisasi Pembentukan BUMDes Bersama	Peserta sosialisasi	50 Bumdes Bersama	-	300 Orang	300 Orang	100	70 orang	370 Orang	74

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	5	Teknologi Informasi Pernerdayaan Ekonomi Terpadu	Sistem teknologi informasi pernerdayaan ekonomi terpadu, jumlah peserta	1 Sistem	-	-	-	-	1 Sistem		
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat									
	1	Bina Kerja PKK	Jumlah peserta rapat Koordinasi Jumlah peserta Bina Wilayah Jumlah peserta Pelatihan Kader Dasa Wisma Juara Lomba Menu Etnik Tk. Kabupaten Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan	42 TP PKK Kec 442 Desa/ Kel 650 orang 36 Juara 2210 Kader PKK	42 TP PKK Kec 442 Desa/ Kel	84TP PKK Kec 442 Desa/ Kel 50 Orang 6 Juara 442 TP PKK Kec/Desa	84TP PKK Kec 442 Desa/ Kel 50 Orang 6 Juara 442 TP PKK Kec/Desa	100	42 TP PKK Kec 42 Kecamatan 100 Orang 6 Juara 442 TP PKK Kec/Desa	42 TP PKK Kec 42 Kecamatan 150 Orang 12 Juara 884 TP PKK Kec/Desa	40
	2	Pembinaan dan bimbingan teknis kepemimpinan kader bagi kader PKK Desa	Jumlah peserta bimtek	650 Orang	-	80 Orang	80 Orang	100	134 orang	214 Orang	32,9
	3	Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kel	Jumlah anggota lembaga desa yang dibina	11050 orang	-	-	-	-	760 orang	760 orang	6,88
	4	Lomba posyandu dan olimpiade kader	Juara lomba posyandu, Juara olimpiade kader	36 posyandu, 36 Kader	-	6 Posyandu, 6 kader	6 Posyandu, 6 kader	100	6 Posyandu, 6 kader	12 Posyandu, 12 kader	33,33
	5	Peningkatan kapasitas kader posyandu	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu	442 Kader Posyandu	-	442 Kader Posyandu	442 Kader Posyandu	100	442 orang	442 Kader Posyandu	40
	6	Penguatan kelembagaan posyandu melalui pokjantal kabupaten	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu	42 Pokjantal Kecamatan	-	42 Pokjantal Kecamatan	42 Pokjantal Kecamatan	100	42 orang	42 Pokjantal Kecamatan	40
	7	Pembinaan Pengelola Ex PNPMPd tentang aset	Dokumen perguliran aset ex PNPMPd	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	40

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	8	Penyediaan kader pembangunan manusia dalam pelaksanaan penurunan stunting terintegrasi di tingkat desa/kelurahan	Jumlah Kader pembangunan manusia yang dibina	421 orang	-	-	-	-	243 KPM		57,7
	9	Bintek Peningkatan Partisipatif masyarakat Dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Pembangunan Desa	Jumlah peserta bimtek	3368 orang	-	-	-	-	231 Orang		6,9
	10	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Masyarakat	Desa juara pelaksanaan BBGRM terbaik dan pelaksanaan pencanangan BBGRM Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi Jawa Barat	5 Desa	-	1 desa	1 desa	100	1 desa	2 Desa	40
	11	Bhakti Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Jumlah sarana prasarana yang dibangun	12 Kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100	4 kegiatan	5 Kegiatan	41,7
	12	Peningkatan Peran serta Masyarakat melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)	Jumlah sarana prasarana yang dibangun	12 Kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100	2 kegiatan	3 Kegiatan	25,0
		Program Pengembangan Potensi Desa									
	1	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	24 Kali	1 Kali	3 kali	3 kali	100	3 kali	3 kali	12,5
	2	Bimtek Inovasi Alat Teknologi Tepat Guna Bagi Pengurus Posyantek	Jumlah peserta bimtek	671 Orang	-	421 Orang	421 Orang	100	134 Orang , 2 angkatan	555 Orang	83
	3	Aplikasi Sistem Informasi Maju Posyantek	Sistem Informasi Maju Posyantek	1 Sistem	-	-	-	-	1 Sistem		
	4	Peningkatan Strata Badan Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi	Jumlah peserta bimtek	375 Orang	-	15 Orang	15 Orang	100	75 Orang	90 orang	24
	5	Pendampingan Bantuan Provinsi Peningkatan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah desa yang dimonitoring, jumlah peserta bimtek	421 Desa	-	357 Desa	357 Desa	100	175 Desa , 462 Orang	357 Desa	85

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	6 Inventarisasi potensi sumber daya alam	Jumlah peserta bimtek	1052 Orang	-	-	-	-	130 Orang	130 Orang	12
	7 Pendampingan Program Bantuan Kemendes Peningkatan sarana Prasarana Desa	Jumlah desa yang dimonitoring	100 Desa	-	-	-	-	10 Desa	10 Desa	10
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pemerintahan Desa									
	1 Bimtek sistem pengelolaan keuangan desa bagi Sekdes dan Bendahara desa	Jumlah peserta bimtek	825 Orang	330 Orang	282 Orang	282 Orang	100	290 Orang	572 Orang	69
	2 Bimtek Kepala Desa Hasil Pilkades serentak	Jumlah peserta bimtek	421 Orang	-	80 Orang	80 Orang	100	125 Kepala desa Definitif	205 Orang	49
	3 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah peserta bimtek, jumlah aparatur desa yang dibayarkan BPJS	421 Desa	-	-	-	-	84 Desa , 4631 orang	84 Desa	20
	4 Evaluasi Perkembangan Desa	Dokumen perkembangan desa	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	40
	5 Profil Desa dan Kelurahan	Dokumen profil desa dan kelurahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	40
	6 Penataan Aset Desa	Jumlah peserta sosialisasi	421 Desa	-	-	-	-	84 Desa		
	7 Penataan & Penegasan Batas Desa	Jumlah peserta sosialisasi	421 Desa	-	-	-	-	883 Orang		
	8 Aplikasi Sistem pelaporan administrasi desa	Sistem pelaporan administrasi desa	1 Sistem	-	-	-	-	1 Sistem	1 Sistem	100
	9 Monitoring pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	Jumlah desa yang dimonitoring tentang berbasis Siskeudes	421 desa	-	-	-	-	421 Desa		
	10 Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	Jumlah desa yang dibina tentang penyelenggaraan pemerintah desa	421 desa	-	-	-	-	421 Desa	421 Desa	20
	11 Raperda tentang perubahan ke 2 atas peraturan daerah no.18 tahun 2014 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah peraturan daerah perubahan	1 Perda	-	-	-	-	1 Perda Perubahan	1 Perda	100

1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		12 Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah no.19 tahun 2014 tentang BPD	Jumlah peraturan daerah perubahan	1 Perda	-	-	-	-	1 Perda Perubahan	1 Perda	100
		13 Pelantikan kepala desa definitif	Pelantikan kepala desa definitif	421 Kepala Desa	-	128 Kepala Desa	128 Kepala Desa	100	38 Kepala Desa	166 Kepala Desa	39
		14 Sosialisasi Perbup ADD dan DD	Jumlah peserta sosialisasi	421 Desa	-	421 Desa	421 Desa	100	1263 Orang	421 Desa	40



a. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja Pelayanan SKPD dilakukan berdasarkan kegiatan tahun 2019 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2020. Pencapaian target RENSTRA sampai dengan tahun 2022 bervariasi dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GARUT**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang			86,22%	92,40%	94,78%	100,00%	86,22%	92,40%	100,00%	100,00%	



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Isu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berkembang saat ini di Kabupaten Garut adalah :

a. Bidang pemerintahan desa

- 1) Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan unsur pelaksana pemerintahan desa dalam administrasi dan keuangan desa.
- 2) Masih tingginya proporsi bangunan ruangan kantor Desa, BPD, LPM, PKK yang rusak dan rusak berat.
- 3) Belum optimalnya dukungan bagi kesejahteraan para kades dan perangkat desa.
- 4) Adanya kecenderungan disharmoni sosial yang mengarah kepada disintegrasi sosial yang diakibatkan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan pemerintahan di desa antara unsur aparatur pemerintahan desa dan lembaga pemerintahan desa.
- 5) Kurang transparannya batas wilayah administrasi desa.
- 6) Perlunya pemekaran desa bagi desa-desa yang telah memenuhi syarat untuk pemekaran desa.

b. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa

- 1) Masih banyak ditemukan pelaksanaan kegiatan di desa yang tidak menempuh tahapan proses pemberdayaan masyarakat secara utuh, seharusnya tahapan proses pemberdayaan masyarakat menggunakan metode partisipatif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dan tindak lanjutnya.



- 2) Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan, karena kurang efektifnya fungsi lembaga pemerintahan desa dan lembaga masyarakat (LPM, BPD dan PKK) dalam penggerakan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Masih rendahnya keterampilan teknis untuk lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RW,RT,dst) dalam rangka peningkatan skill dan profesionalisme mereka selaku pelaku pembangunan.
- 4) Perlunya pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta perlunya pemantapan Aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

- 1) Masih kurangnya kemampuan pengolahan hasil produksi, penguatan modal dan jaringan pemasaran di perdesaan khususnya desa pesisir (pasar desa).
- 2) Kurangnya penguatan kelembagaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh pemerintah Desa dan wadah perolehan kredit modal usaha yang cepat bagi warga desa.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan lembaga keuangan mikro perdesaan.
- 4) Belum optimalnya pembinaan terhadap potensi-potensi ekonomi lokal.



d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana Desa dan Teknologi Tepat Guna

- 1) Belum optimalnya identifikasi dan inventarisasi sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna yang mendukung/menunjang pembangunan sebagai pembentuk jati diri perdesaan.
- 2) Belum beroperannya Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di tingkat kecamatan dan Warung Teknologi Tepat Guna (Wartegda) di tingkat desa dalam memfasilitasi masyarakat pengguna TTG.
- 3) Belum optimalnya pembinaan terhadap potensi-potensi ekonomi lokal untuk pengembangan SDA dan TTG.

Adapun berdasarkan hasil analisis dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah:

Permasalahan

- a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan adalah tidak tersedianya dana stimulan untuk mengimplementasikan hasil pelatihan.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat adalah belum meratanya kemampuan organisasi kemasyarakatan dalam memahami tugas dan fungsinya.
- c. Program Pengembangan Potensi Desa adalah kurangnya unsur transparansi dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



- d. Program Bina Aparatur dan Aset Pemerintah Desa adalah masih terbatasnya kewenangan yang dimiliki aparaturnya pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Upaya Pemecahan

- a) Upaya pemecahan masalah Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan adalah memfasilitasi pemerintah desa/kelurahan dalam menyediakan dana stimulan usaha ekonomi desa dari APBDes.
- b) Upaya pemecahan masalah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat adalah pembinaan secara intensif, terpadu dan kesinambungan dari masing-masing SKPD yang terkait, yang menangani secara teknis administrasi pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyuluhan serta pendidikan dan latihan.
- c) Upaya pemecahan masalah Program Pengembangan Potensi Desa Desa adalah mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dilaksanakan oleh tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- d) Upaya pemecahan masalah Program Bina Aparatur dan Aset Pemerintah Desa adalah pelimpahan wewenang kepada desa dari tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten secara proporsional.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD diperoleh dari target pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 dan berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat



dan Desa tahun 2019-2024. Adapun Analisis kebutuhan diperoleh setelah kegiatan musrenbang tingkat kabupaten selesai. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, perbandingan antara rancangan akhir RKPD dengan analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN GARUT**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Desa/Kel	Kec					Desa/Kel	Kecamatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,013	6.994.881.355	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,013	6.994.881.355	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase dokumen perencanaan serta dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	190.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase dokumen perencanaan serta dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	190.000.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD	7 dokumen	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD	7 dokumen	35.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja SKPD	4 dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja SKPD	4 dokumen	30.000.000	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Garut		Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	125.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Garut		Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	125.000.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	5.152.781.355	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	5.152.781.355	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	5.127.781.355	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	5.127.781.355	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah dokumen laporan keuangan	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah dokumen laporan keuangan	1 Dokumen	25.000.000	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase ketersediaan pengamanan barang milik daerah	100%	150.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase ketersediaan pengamanan barang milik daerah	100%	150.000.000	
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah tenaga keamanan	4 Orang	150.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah tenaga keamanan	4 Orang	150.000.000	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cimanganten	Tarogong Kaler	Persentase tingkat pemenuhan disiplin aparatur DPMD	100%	271.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cimanganten	Tarogong Kaler	Persentase tingkat pemenuhan disiplin aparatur DPMD	100%	271.000.000	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah jenis pakaian dinas pegawai DPMD	3 Jenis	71.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah jenis pakaian dinas pegawai DPMD	3 Jenis	71.000.000	
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Pegawai DPMD yang mendapatkan peningkatan kompetensi	75 Orang	200.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Pegawai DPMD yang mendapatkan peningkatan kompetensi	75 Orang	200.000.000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	100%	558.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	100%	558.600.000	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	14 jenis	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	14 jenis	15.000.000	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Jenis Peralatan serta Perlengkapan Kantor yang Tersedia	58 Jenis 4 Jenis	155.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Jenis Peralatan serta Perlengkapan Kantor yang Tersedia	58 Jenis 4 Jenis	155.000.000	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	18 jenis	55.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	18 jenis	55.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Desa/Kel	Kec					Desa/Kel	Kecamatan				
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	192 eksemplar	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	192 eksemplar	15.000.000	
1.5.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Makanan dan minuman tamu	1440 Box	27.600.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Makanan dan minuman tamu	1440 Box	27.600.000	
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Garut dan Luar Kabupaten Garut		Jumlah waktu pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi serta jumlah makanan dan minuman bagi peserta rapat	12.00 Bulan 600 Box	291.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Garut dan Luar Kabupaten Garut		Jumlah waktu pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi serta jumlah makanan dan minuman bagi peserta rapat	12.00 Bulan 600 Box	291.000.000	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik	100%	80.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik	100%	80.000.000	
1.6.1	Pengadaan Mebel	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Jenis Mebelair sarana penunjang aparatur	2 Jenis	60.000.000	Pengadaan Mebel	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Jenis Mebelair sarana penunjang aparatur	2 Jenis	60.000.000	
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sarana penunjang aparatur	5 Jenis	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sarana penunjang aparatur	5 Jenis	20.000.000	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase penyediaan jasa bagi unit kerja internal dengan pelayanan Baik	100%	227.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase penyediaan jasa bagi unit kerja internal dengan pelayanan Baik	100%	227.500.000	
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah dan bukti pembayaran rekening telepon, air dan listrik	12 Bulan	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah dan bukti pembayaran rekening telepon, air dan listrik	12 Bulan	70.000.000	
1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara	3 Jenis	7.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara	3 Jenis	7.500.000	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah jasa petugas kebersihan	4 Orang	150.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah jasa petugas kebersihan	4 Orang	150.000.000	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur	100%	365.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur	100%	365.000.000	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terawat	27 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terawat	27 Unit	40.000.000	
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan Secara Berkala	1 Gedung	325.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cimanganten	Tarogong Kaler	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan Secara Berkala	1 Gedung	325.000.000	
2	PROGRAM PENATAAN DESA			Persentase penataan desa	60%	1.900.000.000	PROGRAM PENATAAN DESA			Persentase penataan desa	60%	1.900.000.000	
2.1	Penyelenggaraan Penataan Desa			Jumlah laporan penyelenggaraan penataan desa	1 Laporan	1.900.000.000	Penyelenggaraan Penataan Desa			Jumlah laporan penyelenggaraan penataan desa	1 Laporan	1.900.000.000	
2.1.1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Garut		Data hasil evaluasi rencana pemekaran perda pemekaran desa	Jumlah 1 Laporan 1 Perda	350.000.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Garut		Data hasil evaluasi rencana pemekaran perda pemekaran desa	Jumlah 1 Laporan 1 Perda	350.000.000	
2.1.2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	210 desa 20 desa Kabupaten Garut		Jumlah desa yang dimonitoring (peningkatan infrastruktur perdesaan) Jumlah desa yang dimonitoring (peningkatan sarana prasarana desa) Jumlah peserta bimtek peningkatan infrastruktur perdesaan	210 desa 20 desa 462 orang	300.000.000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	210 desa 20 desa Kabupaten Garut		Jumlah desa yang dimonitoring (peningkatan infrastruktur perdesaan) Jumlah desa yang dimonitoring (peningkatan sarana prasarana desa) Jumlah peserta bimtek peningkatan infrastruktur perdesaan	210 desa 20 desa 462 orang	300.000.000	
2.1.3	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Garut		Jumlah sarana prasarana yang dibangun (TNI) Jumlah sarana prasarana yang dibangun (BSMSS)	2 Kegiatan 4 Kegiatan	1.250.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Garut		Jumlah sarana prasarana yang dibangun (TNI) Jumlah sarana prasarana yang dibangun (BSMSS)	2 Kegiatan 4 Kegiatan	1.250.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Desa/Kel	Kec					Desa/Kel	Kecamatan				
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			Persentase kerjasama desa dan kawasan perdesaan	2,85%	350.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			Persentase kerjasama desa dan kawasan perdesaan	2,85%	350.000.000	
3.1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa			Jumlah pembentukan kerjasama antar desa	10 Desa	350.000.000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa			Jumlah pembentukan kerjasama antar desa	10 Desa	350.000.000	
3.1.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut		Jumlah kelompok usaha masyarakat	10 kelompok	150.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut		Jumlah kelompok usaha masyarakat	10 kelompok	150.000.000	
3.1.2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Malangbong, Selaawi		Jumlah kawasan perdesaan yang dibentuk dan dikembangkan	2 kawasan perdesaan	200.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Malangbong, Selaawi		Jumlah kawasan perdesaan yang dibentuk dan dikembangkan	2 kawasan perdesaan	200.000.000	
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan	60%	8.676.966.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan	60%	8.676.966.000	
4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Jumlah desa yang dibina tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	421 desa	8.676.966.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Jumlah desa yang dibina tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	421 desa	8.676.966.000	
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Garut		Jumlah desa yang dibina tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	421 desa	100.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Garut		Jumlah desa yang dibina tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	421 desa	100.000.000	
4.1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Garut		Jumlah peserta sosialisasi	1263 Orang	300.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Garut		Jumlah peserta sosialisasi	1263 Orang	300.000.000	
4.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Garut		Jumlah peserta bimtek	670 Orang	194.200.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Garut		Jumlah peserta bimtek	670 Orang	194.200.000	
4.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Garut		Jumlah desa yang di monitoring tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	421 Desa	50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Garut		Jumlah desa yang di monitoring tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	421 Desa	50.000.000	
4.1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Garut		Jumlah aparat desa yang terlatih Jumlah kader Pembangunan Manusia yang dibina Jumlah kelompok yang dibina Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang mendapatkan jaminan kesehatan Jumlah peserta bimtek desa wisata Jumlah peserta bimtek inventarisasi sumber daya alam Jumlah peserta bimtek Siskeudes Jumlah peserta peningkatan kapasitas Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	1684 Orang 84 Orang 36 Kelompok 4631 Orang 60 Orang 211 Orang 140 Orang 75 Orang	6.683.766.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Garut		Jumlah aparat desa yang terlatih Jumlah kader Pembangunan Manusia yang dibina Jumlah kelompok yang dibina Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang mendapatkan jaminan kesehatan Jumlah peserta bimtek desa wisata Jumlah peserta bimtek inventarisasi sumber daya alam Jumlah peserta bimtek Siskeudes Jumlah peserta peningkatan kapasitas Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	1684 Orang 84 Orang 36 Kelompok 4631 Orang 60 Orang 211 Orang 140 Orang 75 Orang	6.683.766.000	
4.1.6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Garut		Jumlah BUMDes yang dimonitoring Jumlah bumdes yang mendapatkan penguatan Jumlah lembaga bumdes bersama yang baru dibentuk	100 BUMDes 150 orang 10 Bumdes	400.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Garut		Jumlah BUMDes yang dimonitoring Jumlah bumdes yang mendapatkan penguatan Jumlah lembaga bumdes bersama yang baru dibentuk	100 BUMDes 150 orang 10 Bumdes	400.000.000	
4.1.7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Garut		Dokumen Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	255.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Garut		Dokumen Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	255.000.000	
4.1.8	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Garut		Dokumen perguliran aset ex PNPM MPd Jumlah desa dengan penataan aset desa yang baik	1 Dokumen 421 desa	194.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Garut		Dokumen perguliran aset ex PNPM MPd Jumlah desa dengan penataan aset desa yang baik	1 Dokumen 421 desa	194.000.000	
4.1.9	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Garut		Jumlah desa yang mendapatkan penataan dan penegasan batas desa Jumlah perbup penataan dan penegasan batas desa	15 desa 1 Perbup	250.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Garut		Jumlah desa yang mendapatkan penataan dan penegasan batas desa Jumlah perbup penataan dan penegasan batas desa	15 desa 1 Perbup	250.000.000	
4.1.10	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Garut		Dokumen evaluasi perkembangan Desa	1 Dokumen	250.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Garut		Dokumen evaluasi perkembangan Desa	1 Dokumen	250.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Desa/Kel	Kec					Desa/Kel	Kecamatan				
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Persentase Lembaga Desa/Kel. yang Aktif	80%	4.465.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Persentase Lembaga Desa/Kel. yang Aktif	80%	4.465.000.000	
5.1	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah lembaga kemasyarakatan	6 Lembaga	4.465.000.000	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah lembaga kemasyarakatan	6 Lembaga	4.465.000.000	
5.1.1	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Kabupaten Garut	Jumlah lembaga adat yang dibina	2 Lembaga Adat	150.000.000	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Kabupaten Garut	Jumlah lembaga adat yang dibina	2 Lembaga Adat	150.000.000	
5.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Kabupaten Garut	Juara lomba posyandu kader posyandu yang terampil Jumlah Lembaga Desa yang dibina Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu	6 Posyandu 2000 Orang 1326 Orang 442 Kader posyandu 42 Pokjanel Kecamatan	1.675.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Kabupaten Garut	Juara lomba posyandu kader posyandu yang terampil Jumlah Lembaga Desa yang dibina Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu	6 Posyandu 2000 Orang 1326 Orang 442 Kader posyandu 42 Pokjanel Kecamatan	1.675.000.000	
5.1.3	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Kabupaten Garut	Gelar Produk Unggulan Desa Tingkat Kabupaten dan Provinsi Jumlah alat penunjang produksi Jumlah kelompok usaha masyarakat Jumlah pendampingan desa emas Kelompok usaha ekonomi yang mempunyai sertifikasi produksi	2 Kali 42 Unit 6 Kelompok BUMDes 3 Desa 100 Kelompok Usaha	500.000.000	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Kabupaten Garut	Gelar Produk Unggulan Desa Tingkat Kabupaten dan Provinsi Jumlah alat penunjang produksi Jumlah kelompok usaha masyarakat Jumlah pendampingan desa emas Kelompok usaha ekonomi yang mempunyai sertifikasi produksi	2 Kali 42 Unit 6 Kelompok BUMDes 3 Desa 100 Kelompok Usaha	500.000.000	
5.1.4	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Kabupaten Garut dan Luar Kabupaten Garut	Gelar TTG Tingkat Kabupaten, provinsi dan nasional Jumlah peserta bimtek inovasi Alat TTG	3 kali 153 orang	640.000.000	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Kabupaten Garut dan Luar Kabupaten Garut	Gelar TTG Tingkat Kabupaten, provinsi dan nasional Jumlah peserta bimtek inovasi Alat TTG	3 kali 153 orang	640.000.000	
5.1.5	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Kabupaten Garut	Desa Juara Pelaksana BBGRM Terbaik dan Pelaksanaan Pencanangan BBGRM Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi	1 Desa	300.000.000	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Kabupaten Garut	Desa Juara Pelaksana BBGRM Terbaik dan Pelaksanaan Pencanangan BBGRM Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi	1 Desa	300.000.000	
5.1.6	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Kabupaten Garut	Jambore Kader Jumlah Peserta Bimtek TP PKK Desa Jumlah Peserta Bina Wilayah Jumlah Peserta Pelatihan Kader Dasa wisma Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan TP3PKK Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Kader PKK Jumlah peserta rapat koordinasi Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK Kabupaten Lomba 10 Program PKK	6 Juara 134 TP PKK Desa 42 Kecamatan 100 Orang 1316 Orang 84 Orang 42 TP PKK Kab 40 TP PKK Kab 1 Juara	1.200.000.000	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Kabupaten Garut	Jambore Kader Jumlah Peserta Bimtek TP PKK Desa Jumlah Peserta Bina Wilayah Jumlah Peserta Pelatihan Kader Dasa wisma Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan TP3PKK Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Kader PKK Jumlah peserta rapat koordinasi Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK Kabupaten Lomba 10 Program PKK	6 Juara 134 TP PKK Desa 42 Kecamatan 100 Orang 1316 Orang 84 Orang 42 TP PKK Kab 40 TP PKK Kab 1 Juara	1.200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Desa/Kel	Kec					Desa/Kel	Kecamatan				
	JUMLAH					22.386.847.355						22.386.847.355	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 disusun sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024. Dalam hal ini renstra telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Penyusunan program dan kegiatan ini senantiasa memperhatikan capaian pembangunan saat ini, mempertimbangkan permasalahan serta isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, penyusunan program kegiatan ini didasarkan atas masukan dari berbagai pihak yang difasilitasi melalui forum musrenbang baik tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENATAAN DESA Penyelenggaraan Penataan Desa				
		Desa Cisirupan, Kab. Garut Cisirupan	Cisirupan	Pembentukan/Pemekaran Desa	
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Fasilitasi Kerja sama antar Desa				
		Kelompok Tani Anugerah III Kp Kaliki RT 03 RW 02, Kab. Garut	Cinisti Bayongbong	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 Paket
		UKM Dodol dan UKM Sale Pisang, Kab. Garut	Cilawu Cilawu	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	6 unit
		Pengadaan Kompor ramah Lingkungan Ds. Cilawu, Kab. Garut	Sukamurni Cilawu	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	30 unit
		Kp. Citelu kelompok Maju Bersama, Kab. Garut	Sukatani Cilawu	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	2 paket
		Kp Babakan Minggu, Kab. Garut	Margamulya Cikajang	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 paket
		Kp. Leubak Seuti RT. 02 RW. 01, Kab. Garut	Mekarjaya Sukaesmi	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	
		Kelompok Usaha Sucok Coet Asgar di Perum Abdi Negara 2 No. 113 RT 02 RW 10 Desa Karangpawitan Kec. Karangpawitan, Kab. Garut	Karangpawitan Karangpawitan	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	5 Set
		Gg. Warung Cendol, Kp. Saripulo RW 02 RT 08, Kab. Garut	Rancabango Tarogong Kaler	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	21 Item
		Kelompok Haruman Sari Kp. Cikembulan (Bantuan Open Pemanas Padi Huller), Kab. Garut	Cikembulan Kadungora	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 Buah
		Sekretariat DPD sahabat polisi garut, Kab. Garut	Mekargalih Tarogong Kidul	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 paket
		Kp Cianten RT/Rw 07/01, Kab. Garut	Ciwangi Bl. Limbangan	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 paket
		Kp. Ciharuman Rt03/Rw04, Kab. Garut	Harumansari Kadungora	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 unit
		Kp. Babakan Jati Rt02/Rw. 08, Kab. Garut	Gandamekar Kadungora	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 unit
		Kp. Gombang Rt/Rw 04/09, Kab. Garut	Surabaya Bl. Limbangan	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 unit
		Kp. Cihanjuang Rt/Rw 04/02, Kab. Garut	Pangeureunan Bl. Limbangan	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 unit
		Kp. Langkob Rt/Rw 01/05, Kab. Garut	Jayamukti Cihurip	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 unit
		Kp.Cilutung Rt/Rw 01/06, Kab. Garut	Jayamukti Cihurip	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 unit
		Kp. Rontog Rt/Rw 08/04, Kab. Garut	Jayamukti Cihurip	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 unit
		Kp. Cisanyoh Rt/Rw 01/04, Kab. Garut	Pelitaasih Selaawi	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	10 unit

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		Kp. Babakan Mispalah Rt/Rw 09/04, Kab. Garut	Tanjunganom Samarang	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Kp. Sukaregang Rt/Rw 04/21, Kab. Garut	Kota Wetan Garut Kota	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1000 unit	
		Kp. Ciwalen Rt/Rw 05/13, Kab. Garut	Sukanegla Seluruh Kecamatan	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Jln. Brathayudha Kp. Kondangrege Rt/Rw 03/15, Kab. Garut	Regol Garut Kota	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Jln. Cibuyutan No.1, Kab. Garut	Sukalaksana Banyuuresmi	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Kp. Dangi, Kab. Garut	Sukanegla Garut Kota	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Kp. Cikondeh Rt/Rw 03/05, Kab. Garut	Margaluyu Leles	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Kp. Cilanjung Dusun 3 Rt/Rw 02/08, Kab. Garut	Selaawi Selaawi	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Kp. Sayuran Rt/Rw 01/010, Kab. Garut	Haruman Leles	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Jln. Cibuyutan No. 01 Rt 01 Rw 04, Kab. Garut	Sukalaksana Banyuuresmi	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Kp. Pananggungan Rtrw 03/. 07, Kab. Garut	Lengkongjaya Karangpawitan	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Kp. Cipondoh Rt/Rw 04/06, Kab. Garut	Cipareuan Cibiuk	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Kp. Cicariu Rt/Rw 02/016, Kab. Garut	Sukasenang Seluruh Kecamatan	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	10 unit	
		Kp. Sawah Lega Rt/Rw 004/002, Kab. Garut	Ngamplang Cilawu	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Kp. Penclut Kaler Rt/Rw 01/05, Kab. Garut	Ngamplang Cilawu	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Kp. Cisanyoh Rt/Rw 02/04, Kab. Garut	Pelitaasih Selaawi	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Kp. Cimuncang, Kab. Garut	Kutanagara Malangbong	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	5 unit	
		Kp. Ciwahang Rt. 04/05, Kab. Garut	Sukamanah Malangbong	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Kp. Depok Rt/Rw 002/004, Kab. Garut	Mekarraya Kersamanah	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Kp. Babakan Serang Rt/Rw 01/10, Kab. Garut	Cibiuk Kaler Cibiuk	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Kp. Pasirgede Rt/Rw 02/08, Kab. Garut	Cibiuk Kaler Cibiuk	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	
		Kp. Cihanja Rt/Rw 01/01, Kab. Garut	Lingkungpasir Cibiuk	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Rm)	1 unit	

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		Kp. Babakan Serut Rt/Rw 01/04, Kab. Garut	Cibiuk Kidul Cibiuk	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	10 unit	
		Kp. Mulabaruk Rt/Rw 02/05, Kab. Garut	Sukawening Sukawening	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	1 unit	
		Kp. Sirnagalih Rt/Rw 02/01, Kab. Garut	Sukaratu Malangbong	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	1 unit	
		Kp. Sukasirna Rt/Rw 03/08, Kab. Garut	Limbangan Timur Bl. Limbangan	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	1 unit	
		Kp. Cianten Rt/Rw 04/01, Kab. Garut	Ciwangi Bl. Limbangan	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	1 unit	
		Kp. Brdikari Rt/Rw 01/07, Kab. Garut	Limbangan Timur Bl. Limbangan	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	1 unit	
		Kp. Cibungur Rt 02/ Rt 03, Kab. Garut	Samida Selaawi	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	1 unit	
		desa kadungora, Kab. Garut	Kadungora Kadungora	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	1 unit	
		kp. suka makmur, Kab. Garut	Karangmulya Kadungora	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	2 unit	
		Kp. Cilanjung Dusun 3 Rt/Rw 02/08, Kab. Garut	Selaawi Selaawi	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	2 unit	
		Kp. Penclut Kaler Rt/Rw 01/05, Kab. Garut	Ngamplang Cilawu	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	100 m2	
		Kp. Cilanjung Dusun 3 Rt/Rw 02/08, Kab. Garut	Selaawi Selaawi	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	10 unit	
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					
		kp harempoy rt 05 rw 02, Kab. Garut	Karyajaya Bayongbong	Pembinaan Aset Desa	1 RKB	
		KP. TANJUNG, Kab. Garut	Pananjung Tarogong Kaler	Pembangunan Tugu Batas Desa	1 titik	
		Desa Cinisti, Kab. Garut	Cinisti Bayongbong	Bantuan Modal Bumdes	1 Paket	
		Desa Bayongbong, Kab. Garut	Bayongbong Bayongbong	Bantuan Modal Bumdes	1 ls	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
		Desa Bayongbong, Kab. Garut	Bayongbong Seluruh Kecamatan	Pembinaan Kader PKK	1 Paket	
		14 RW DI DESA PASAWAHAN, Kab. Garut	Pasawahan Tarogong Kaler	Pembinaan Kader Dasawisma	14 RW	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Rencana Pembangunan Nasional

Visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur. Visi itu dijalankan melalui delapan misi pembangunan. Kedelapan misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan bekeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

3.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

1. Mendorong peningkatan kualitas penataan dan administrasi Desa guna meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa.



2. Peningkatan kapasitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset Desa .
4. Penguatan fungsi kelembagaan Desa dan meningkatkan kerjasama desa.
5. Mendayagunakan potensi dan aset Desa (alam dan buatan) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Memperkuat pengarusutamaan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang berkesinambungan.
7. Memperkuat kelembagaan BUMDes sebagai wadah kreativitas Desa.
8. Memperkuat keterkaitan dan kemitraan BUMDes dengan ekonomi lokal dan regional.
9. Memantapkan dukungan terhadap produk unggulan Desa yang berorientasi pada ekonomi hijau agar memiliki daya saing ekonomi.
10. Mempertegas status wilayah dan kewenangan Desa di dalam kawasan hutan dan perkebunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2019-2024, tujuan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut adalah “**Meningkatnya kemajuan pembangunan desa .”**

Untuk mencapai tujuan pembangunan DPMD tersebut, maka disusunlah tujuan, sasaran , strategi serta arah kebijakan sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 berikut ini



Tabel 3.1
Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1 Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	1 Meningkatnya jumlah desa yang meningkat status pembangunannya	1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa	1 Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa
			2 Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
			3 Peningkatan kualitas penataan desa
			4 Penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan

Sampai dengan realisasi capaian kinerja tahun 2020 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2021, seluruh kegiatan yang dilaksanakan mendukung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun, persentase capaian cukup beragam dan sangat tergantung pada kerangka penganggaran yang disediakan.



3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - iii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - iv. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.



- v. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- vi. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - ii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Tujuan program ini adalah terpenuhinya fasilitas kebutuhan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran. Melalui program ini diharapkan pelayanan administrasi perkantoran dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Total alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 6.994.881.355,- dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 2.1. Rincian Anggaran Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Berdasarkan Sumber Dana**

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Ket
1	APBN	-	
2	APBD Provinsi	-	
3	APBD Kabupaten	6.994.881.355	
Jumlah		6.994.881.355	

2. Program Penataan Desa, dengan kegiatan :

a. Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan sub kegiatan :

- i. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa.
- ii. Fasilitasi Tata Wilayah Desa.
- iii. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa.

Tujuan program ini adalah terpenuhinya fasilitas kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Melalui program ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Total alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 1.900.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 2.2. Rincian Anggaran Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Berdasarkan Sumber Dana**

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Ket
1	APBN	-	
2	APBD Provinsi	-	
3	APBD Kabupaten	1.900.000.000	
Jumlah		1.900.000.000	

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa, dengan kegiatan :

a. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, dengan sub kegiatan :

- i. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota.
- ii. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Tujuan program ini adalah tersedianya sumber adaya aparatur yang berkualitas. Melalui program ini diharapkan tercapainya peningkatan kualitas aparatur pegawai DPMD sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Total alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 350.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.3. Rincian Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Ket
1	APBN	-	
2	APBD Provinsi	-	
3	APBD Kabupaten	350.000.000	
Jumlah		350.000.000	

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan :

- i. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
- ii. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa.
- iii. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
- iv. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- v. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
- vi. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.
- vii. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- viii. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.
- ix. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.



- x. Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- xi. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

Tujuan program ini adalah tercapainya penyusunan dokumen pelaporan program dan kegiatan sesuai yang direncanakan. Melalui program ini diharapkan tercapainya penyusunan dokumen pelaporan SKPD sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Total alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 8.676.966.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4. Rincian Anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Ket
1	APBN	-	
2	APBD Provinsi	-	
3	APBD Kabupaten	8.676.966.000	
Jumlah		8.676.966.000	

- 5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kegiatan :
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat



Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- i. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- ii. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- iii. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- iv. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- v. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- vi. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Tujuan program ini adalah tercapainya penyusunan dokumen pelaporan program dan kegiatan sesuai yang direncanakan. Melalui program ini diharapkan tercapainya penyusunan dokumen pelaporan SKPD sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Total alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 4.465.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4. Rincian Anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Ket
1	APBN	-	
2	APBD Provinsi	-	
3	APBD Kabupaten	4.465.000.000	
Jumlah		4.465.000.000	

Pada Tahun 2022 ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan 5 program, 12 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan indikasi anggaran total **Rp. 22.386.847.355** ,- , dengan perincian dapat disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini:

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPMD TAHUN 2022
DAN PERKIRAAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN GARUT**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		84,013	6.994.881.355			85,006	6.994.881.355
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan serta dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		100%	190.000.000			100%	190.000.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD	DPMD Kabupaten Garut	7 dokumen	35.000.000	DAU		7 dokumen	35.000.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja SKPD	DPMD Kabupaten Garut	4 dokumen	30.000.000	DAU		4 dokumen	30.000.000
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	DPMD Kabupaten Garut	5 dokumen	125.000.000	DAU		5 dokumen	125.000.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		100%	5.152.781.355			100%	5.152.781.355
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kabupaten Garut	12 bulan	5.127.781.355	DAU		12 bulan	5.127.781.355
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	DPMD Kabupaten Garut	1 Dokumen	25.000.000	DAU		1 Dokumen	25.000.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan pengamanan barang milik daerah		100%	150.000.000				150.000.000
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan	DPMD Kabupaten Garut	4 Orang	150.000.000	DAU		4 Orang	150.000.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan disiplin aparatur DPMD		100%	271.000.000			100%	271.000.000
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas pegawai DPMD	DPMD Kabupaten Garut	3 Jenis	71.000.000	DAU		3 Jenis	71.000.000
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai DPMD yang mendapatkan peningkatan kompetensi	DPMD Kabupaten Garut	75 Orang	200.000.000	DAU		75 Orang	200.000.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100%	558.600.000			100%	558.600.000
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	DPMD Kabupaten Garut	14 jenis	15.000.000	DAU		14 jenis	15.000.000
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Jenis Peralatan serta Perlengkapan Kantor yang Tersedia	DPMD Kabupaten Garut	58 Jenis 4 Jenis	155.000.000	DAU		58 Jenis 4 Jenis	155.000.000
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	DPMD Kabupaten Garut	18 jenis	55.000.000	DAU		18 jenis	55.000.000
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	DPMD Kabupaten Garut	192 eksemplar	15.000.000	DAU		192 eksemplar	15.000.000

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman tamu	DPMD Kabupaten Garut	1440 Box	27.600.000	DAU		1440 Box	27.600.000
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi serta jumlah makanan dan minuman bagi peserta rapat	DPMD Kabupaten Garut	12.00 Bulan 600 Box	291.000.000	DAU		12.00 Bulan 600 Box	291.000.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik		100%	80.000.000			100%	80.000.000
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebelair sarana penunjang aparatur	DPMD Kabupaten Garut	2 Jenis	60.000.000	DAU		2 Jenis	60.000.000
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sarana penunjang aparatur	DPMD Kabupaten Garut	5 Jenis	20.000.000	DAU		5 Jenis	20.000.000
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa bagi unit kerja internal dengan pelayanan Baik		100%	227.500.000			100%	227.500.000
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dan bukti pembayaran rekening telepon, air dan listrik	DPMD Kabupaten Garut	12 Bulan	70.000.000	DAU		12 Bulan	70.000.000
1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara	DPMD Kabupaten Garut	3 Jenis	7.500.000	DAU		3 Jenis	7.500.000
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan	DPMD Kabupaten Garut	4 Orang	150.000.000	DAU		4 Orang	150.000.000
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur		100%	365.000.000				365.000.000
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terawat	DPMD Kabupaten Garut	27 Unit	40.000.000	DAU		27 Unit	40.000.000
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan Secara Berkala	DPMD Kabupaten Garut	1 Gedung	325.000.000	DAU		1 Gedung	325.000.000
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa		60%	1.900.000.000			80%	8.050.000.000
2.1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah laporan penyelenggaraan penataan desa		1 Laporan	1.900.000.000			1 Laporan	8.050.000.000
2.1.1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Data hasil evaluasi rencana pemekaran Jumlah perda pemekaran desa	Kabupaten Garut	1 Laporan Perda 1	350.000.000	DAU		26 Desa	6.500.000.000
2.1.2	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang dimonitoring (peningkatan infrastruktur perdesaan) Jumlah desa yang dimonitoring (peningkatan sarana prasarana desa) Jumlah peserta bimtek peningkatan infrastruktur perdesaan	210 desa 20 desa Kabupaten Garut	210 desa 20 desa 462 orang	300.000.000	DAU		211 desa 20 desa 462 orang	300.000.000
2.1.3	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana prasarana yang dibangun (TNI) Jumlah sarana prasarana yang dibangun (BSMSS)	Kabupaten Garut	2 Kegiatan 4 Kegiatan	1.250.000.000	DAU		2 Kegiatan 4 Kegiatan	1.250.000.000
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama desa dan kawasan perdesaan		2,85%	350.000.000			4,04%	450.000.000
3.1	Fasilitas Kerja sama antar Desa	Jumlah pembentukan kerjasama antar desa		10 Desa	350.000.000			15 desa Perbup	450.000.000

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok usaha masyarakat	Kabupaten Garut	10 kelompok	150.000.000	DAU		10 kelompok	200.000.000
3.1.2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang dibentuk dan dikembangkan	Kec. Malangbong, Kec. Selaawi	2 kawasan perdesaan	200.000.000	DAU		2 kawasan perdesaan	250.000.000
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan		60%	8.676.966.000			80%	9.276.966.000
4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	Kabupaten Garut	421 desa	8.676.966.000			421 Desa	9.276.966.000
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	Kabupaten Garut	421 desa	100.000.000	DAU		421 desa	100.000.000
4.1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah peserta sosialisasi	Kabupaten Garut	1263 Orang	300.000.000	DAU		1263 Orang	300.000.000
4.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah peserta bimtek	Kabupaten Garut	670 Orang	194.200.000	DAU		670 Orang	194.200.000
4.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang di monitoring tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	Kabupaten Garut	421 Desa	50.000.000	DAU		421 Desa	50.000.000
4.1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur desa yang terlatih Jumlah Kader Pembangunan Manusia yang dibina Jumlah kelompok yang dibina Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang mendapatkan jaminan kesehatan Jumlah peserta bimtek desa wisata Jumlah peserta bimtek inventarisasi sumber daya alam Jumlah peserta bimtek Siskeudes Jumlah peserta peningkatan kapasitas Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Kabupaten Garut	1684 Orang 84 Orang 36 Kelompok 4631 Orang 60 Orang 211 Orang 140 Orang 75 Orang	6.683.766.000	DAU		1684 Orang 84 Orang 36 Kelompok 4631 Orang 60 Orang 211 Orang 140 Orang 75 Orang	6.683.766.000
4.1.6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang dimonitoring Jumlah bumdes yang mendapatkan penguatan lembaga bumdes bersama yang baru dibentuk	Kabupaten Garut	100 BUMDes 150 orang Bumdes	400.000.000	DAU		200 BUMDes 200 orang Bumdes	450.000.000
4.1.7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa pelaksana pilkades yang dimonitoring Jumlah desa yang mengikuti pilkades Jumlah Kepala Desa yang dilantik				DAU		79 Desa 79 Desa 79 Orang	550.000.000
4.1.8	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dokumen Profil Desa dan Kelurahan	Kabupaten Garut	1 Dokumen	255.000.000	DAU		1 dokumen	255.000.000
4.1.9	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen perguliran aset ex PNPM MPd Jumlah desa dengan penataan aset desa yang baik	Kabupaten Garut	1 Dokumen 421 desa	194.000.000	DAU		1 Dokumen 421 desa	194.000.000
4.1.10	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang mendapatkan penataan dan penegasan batas desa Jumlah perbup penataan dan penegasan batas desa	Kabupaten Garut	15 desa Perbup	250.000.000	DAU		15 desa Perbup	250.000.000
4.1.11	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen evaluasi perkembangan Desa	Kabupaten Garut	1 Dokumen	250.000.000	DAU		1 dokumen	250.000.000

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Desa/Kel. yang Aktif		80%	4.465.000.000			85%	4.510.000.000
5.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan		6 Lembaga	4.465.000.000			6 Lembaga	4.510.000.000
5.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga adat yang dibina	Kabupaten Garut	2 Lembaga Adat	150.000.000	DAU		2 Lembaga Adat	150.000.000
5.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Juara lomba posyandu Jumlah kader posyandu yang terampil Jumlah Lembaga Desa yang dibina Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu	Kabupaten Garut	6 Posyandu 2000 Orang 1326 Orang 442 Kader posyandu 42 Pokjanel Kecamatan	1.675.000.000	DAU		6 Posyandu 2000 Orang 1326 Orang 442 Kader posyandu 42 Pokjanel Kecamatan	1.675.000.000
5.1.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Gelar Produk Unggulan Desa Tingkat Kabupaten dan Provinsi Jumlah alat penunjang produksi Jumlah kelompok usaha masyarakat Jumlah pendampingan desa emas Kelompok usaha ekonomi yang mempunyai sertifikasi produksi	Kabupaten Garut	2 Kali 42 Unit 6 Kelompok BUMDes 3 Desa 100 Kelompok Usaha	500.000.000	DAU		2 Kali 42 Unit 6 Kelompok BUMDes 3 Desa 100 Kelompok Usaha	550.000.000
5.1.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Gelar TTG Tingkat Kabupaten, provinsi dan nasional Jumlah peserta bimtek inovasi Alat TTG	Kabupaten Garut, Luar Kabupaten Garut	3 kali 153 orang	640.000.000	DAU		3 kali 134 orang	635.000.000
5.1.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Desa Juara Pelaksana BBGRM Terbaik dan Pelaksanaan Pencanangan BBGRM Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi	Kabupaten Garut	1 Desa	300.000.000	DAU		1 Desa	300.000.000
5.1.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jambore Kader Jumlah Peserta Bimtek TP PKK Desa Jumlah Peserta Bina Wilayah Jumlah Peserta Pelatihan Kader Dasa wisata Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan TP3PKK Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Kader PKK Jumlah peserta rapat koordinasi Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK Kabupaten Lomba 10 Program PKK	Kabupaten Garut	6 Juara 134 TP PKK Desa 42 Kecamatan 100 Orang 1316 Orang 84 Orang 42 TP PKK Kab 40 TP PKK Kab 1 Juara	1.200.000.000	DAU		6 Juara 134 TP PKK Desa 42 Kecamatan 100 Orang 1316 Orang 84 Orang 42 TP PKK Kab 40 TP PKK Kab 1 Juara	1.200.000.000
JUMLAH						22.386.847.355			29.281.847.355



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi satuan kerja pelaksana program, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai

sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2022 menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penegasan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap pelaksanaan Renstra/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah dan penegasan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun rencana.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran, sehingga dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan tahun mendatang. Sasaran yang akan tercapai memiliki potensi keberhasilan yang lebih besar dibandingkan dengan keberhasilan pada Tahun 2021. Dengan demikian kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN